

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 500/75/2017

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 500/142.1/2014
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SUMBER
DAYA(*FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT PROMOTION /*
FEDEP)KABUPATEN KUDUSPERIODE 2014-2018

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus;
- b. Bahwa dengan berubahnya nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 500/142.1/2014 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Dan SumberDaya (*Forum For Economic Development And Employment Promotion / Fedep*)Kabupaten Kudus Periode 2014-2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 2 -

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

-3-

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 500/142.1/2014 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Dan Sumber Daya (*Forum For Economic Development And Employment Promotion / Fedep*) Kabupaten Kudus Periode 2014-2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 500/142.1/2014 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Dan Sumber Daya (*Forum For Economic Development And Employment Promotion / Fedep*) Kabupaten Kudus Periode 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 500/142.1/2014 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (*Forum For Economic Development And Employment Promotion / Fedep*) Kabupaten Kudus Periode 2014-2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Anggota Forum Pengembangan Ekonomidan Sumber Daya (*Forumfor Economic Development and Employment Promotion/ FEDEP*) Kabupaten Kudus Periode 2014-2018.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 27 Maret 2017

Nomor : 500/75/2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN

FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA

(*FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT PROMOTION / FEDEP*)

KABUPATEN KUDUS PERIODE 2014-2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan PengembanganDaerah	KetuaUmum	
4.	Direktur Rumah MakanUlam Sari Kudus	Ketua I	
5.	Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kudus	Ketua II	
6.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua III	
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris I	
8.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kusuma	Sekretaris II	

9.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator Pokja I (Industri)	
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
12.	Ketua <i>Business Development Service</i> Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus	Anggota	
13.	Ketua Asosiasi Mebel Indonesia (ASMINDO) Kudus	Anggota	
14.	Ketua Forum Rembug Klaster Gebyok dan Rumah Adat	Anggota	
15.	Ketua Forum Rembug Klaster Bordir dan Konveksi& Batik	Anggota	
16.	Ketua Forum Rembug Klaster Genting dan Batu Bata Merah	Anggota	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	Ketua Forum Rembug Klaster Handicraft	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Koordinator Pokja II (Pariwisata)	
19.	Kepala Subbagian Pengembangan Perekonomian Daerah pada Bagian Perekonomian	Anggota	
20.	Direktur Biro Perjalanan Mahardika	Anggota	
21.	Ketua Forum Rembug Klaster Pariwisata	Anggota	
22.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Koordinator Pokja III (Pertanian)	
23.	Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	

24.	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kudus	Anggota	
25.	Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) Kudus	Anggota	
26.	Ketua Forum Rembug Klaster Pertanian Terpadu	Anggota	
27.	Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan	Koordinator Pokja IV (Jasa)	
28.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
29.	Ketua LSM Pusat Peran Serta Masyarakat	Anggota	
30.	Sekretaris Paguyuban Usaha Kecil Menengah Aneka Karya	Anggota	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
31.	Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator Pokja V (Kerjasama)	
32.	Bagian Dokumentasi Suara Merdeka Biro Muria Kudus	Anggota	
33.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
34.	Divisi Kewirausahaan dan Posdaya pada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muria Kudus	Anggota	
35.	Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh	Anggota	

	Indonesia		
36.	Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kudus	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A